
NEGARA DAN MASYARAKAT WARGA DI VIETNAM DAN KOREA SELATAN*

oleh Sigit Rochadi¹

A. Pengantar

Studi tentang hubungan negara dan masyarakat warga kembali menjadi perhatian ilmuwan politik di seluruh dunia awal tahun 1990-an, bersamaan dengan keruntuhan blok sosialis. Dikatakan “kembali” karena bidang tersebut (khususnya masyarakat warga) telah muncul pada abad ke 18 sampai akhir abad 19. Setelah itu konsep masyarakat warga menghilang. Baru ketika Serikat Buruh Solidaritas Polandia di bawah Lech Walesa bangkit melawan negara, para sarjana politik barat tertarik kembali dengan konsep tersebut. Hal demikian didorong oleh gejala yang selama ini dinilai kontradiktif. Dalam sistem sosialis, kehadiran dan peranan negara sangat

kuat. Negara mendominasi kehidupan individu dan masyarakat. Pemerintahan hadir di semua level dan dioperasikan secara nyata oleh Partai Sosialis atau Partai Komunis. Tetapi, Polandia sebagai negara sosialis menunjukkan gejala yang berbeda. Serikat Buruhnya bangkit melawan negara dengan menyuarakan tuntutan yang berbeda dengan doktrin sosialis dan komunis. Bahkan akhirnya, Serikat Buruh mampu menumbangkan rejim yang kuat dan Walesa sebagai ketua Serikat Buruh menjadi Presiden Polandia. Tumbuh kesadaran di kalangan ilmuwan politik, bahwa pada masyarakat sosialis, masyarakat warga tidak sepenuhnya mati dan dikooptasi oleh negara.

Muncullah perhatian ilmuwan politik terhadap negara-negara otoriter dalam usahanya membangun demokrasi. Bersamaan dengan itu dilakukan serangkaian studi tentang transisi demokrasi di sejumlah negara

¹ Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional, menaruh perhatian terhadap gerakan sosial dan kebijakan publik

pasca otoriter, sehingga perhatian terhadap konsep-konsep transisi, demokrasi, *state*, *society*, *civil society* dan konsep terkait lainnya terus berkembang. Artikel ini membahas hubungan negara dan masyarakat warga di Vietnam dan Korea Selatan. Dua negara ini dipilih dengan pertimbangan sedang berada dalam transisi ke demokrasi, keduanya pernah mengalami puncak kediktatoran dan otoriterisme.

B. Konsep Masyarakat Warga dan Negara

Dalam artikel yang dibahas, digunakan berbagai konsep tentang masyarakat warga. Ho Ki Kim (2001) menggunakan konsep yang dikemukakan oleh Cohen dan Arato sebagai “*a sphere of social interaction between economy and state, compose above all of the intimate sphere (especially the family), the sphere of association (especially voluntary association), social movements and form of public communication*”. Konsep ini berangkat dari perspektif sosiologi politik yang menekankan kebebasan masyarakat warga dari negara dan ekonomi, asosiasi sukarela, gerakan sosial dan bentuk-bentuk dari komunikasi publik. Konsep ini oleh Kim digunakan untuk menjelaskan masyarakat warga dalam usahanya memberi sumbangan kepada demokrasi di Korea Selatan. Berbagai asosiasi yang mampu membebaskan diri dari kooptasi negara ternyata mampu menyemaikan demokrasi. Demikian pula gerakan sosial, seperti buruh, mahasiswa dan petani.

Sedangkan Kessler (1998) tidak memberi pengertian masyarakat warga secara khusus dalam artikelnya “*State and Civil Society: Global Context, Southeast Asian Prospect*” tetapi menunjukkan adanya warga negara yang aktif, mereka yang mampu melakukan emansipasi sosial, suatu aktivitas yang sebelumnya milik *citizen* bukan *pariah*. Ada dua kata kunci dalam konsep Kessler, yaitu warga negara yang aktif dan emansipasi sosial. Dengan demikian Kessler tidak menghadapkan warga dengan negara, tetapi mencari “indikator” yang dapat digunakan untuk menunjukkan adanya aktivitas masyarakat yang terbebas dari campur tangan negara. Hal ini dilakukan mengingat ia berusaha untuk menemukan sumber-sumber masyarakat warga di Asia Tenggara. Menurut Kessler, baik *inducement* Islam, neoconfusian maupun peninggalan negara kolonial tidak memberikan dasar yang kuat untuk bangkit dan berkembangnya masyarakat warga. Sumber-sumber yang dibahasnya menunjukkan adanya tuntutan pemerintahan yang kuat dari masyarakat lemah.

Demikian pula Hiang-Kheng Heng (2001) tidak memberikan pengertian masyarakat warga secara ketat dan hanya membahas satu elemen dari masyarakat warga, yaitu media. Setelah menunjukkan berbagai media cetak dan elektronik dalam menegosiasi negara, Heng menulis “*This, in turn, can be located within a larger conceptual framework of state-civil society relation, with the*

media being regarded as a civil society actor". Dibandingkan dengan konsep Cohen dan Arato serta Kessler, Heng lebih spesifik dengan memilih media. Meskipun ia mengakui pendorong utama *doi moi* di Vietnam adalah kekuatan pasar, tetapi media di Vietnam telah berkembang sedemikian rupa sehingga berani mengekspose peristiwa-peristiwa sensitif, seperti korupsi. Media menjadi kekuatan penting yang menggerakkan perubahan masyarakat, mulai gaya hidup, hiburan hingga terbukanya ruang bagi warga untuk menyatakan pendapat. Dalam pengertian demikian, masyarakat warga termasuk usaha-usaha membangun wacana publik. Media massa sangat menonjol menjalankan fungsi ini. Heng secara jelas menunjukkan bangkitnya wacana lain di luar yang diproduksi oleh pemerintah, baik melalui dunia hiburan, *pleasure* maupun selebritis. Bahasa berkembang demikian pesat demikian pula istilah-istilah, pengertian dan pemahamannya. Oleh media, masyarakat diperkaya bahkan kemudian berani membangun konsep sesuai dengan yang mereka maksudkan. Gejala ini menandai kebangkitan masyarakat warga di Vietnam yang ditunjukkan melalui sejumlah poster, stiker, logo, kata-kata di T Shirt, judul lagu, cover kaset, cover majalah dan sebagainya.

Dengan alasan yang berbeda Kwang Young (2001) mempersempit pengertian masyarakat warga hanya sebagai aktivitas *nongovernmental organization (NGO)*. Ia memilih NGO dengan pertimbangan

peranannya yang sangat menonjol dalam memelopori demokrasi di Korea Selatan, baik ketika negara ini berada dalam pemerintahan otoriter maupun setelah reformasi politik. Peran ini mereka ambil melalui berbagai aktivitas yang bertujuan memberdayakan masyarakat (*people empowering*), seperti pendidikan, penerangan, sosialisasi hak-hak buruh, penegakan HAM dan lingkungan hidup. Aktivitas NGO ini menyentuh kepentingan langsung masyarakat bawah dan dalam sistem politik negara kuat (*strong state*) dan partai-partai yang lemah, NGO dapat menjadi tumpuan harapan akan perubahan dari bawah. Sejak akhir tahun 1990-an kematangan NGO dapat menjadi pengontrol dan pemantau kinerja pemerintah. Dengan peran seperti itu, NGO juga menyumbang proses reformasi politik. Dengan demikian penggunaan konsep masyarakat warga tidak sama pada keempat penulis tersebut. Pun keempatnya berbeda dalam hal penekanan. Keempat penulis tersebut sama-sama memandang masyarakat warga sebagai entitas yang mampu menghadapi dominasi, penetrasi dan kooptasi negara. Dalam usaha membangun demokrasi, keempatnya setuju pentingnya kebangkitan dan independensi masyarakat warga.

Sementara itu ketiga penulis lainnya tidak menyebut masyarakat warga, melainkan *society* (masyarakat). David Koh dalam artikelnya berjudul "*State-Society Relation in Vietnam: Strong or Weak State?*", membatasi *society* hanya

pada *ward*, suatu level administrasi paling bawah di kota. Pada masa perang, *Ward* menjalankan peran yang sangat dominan, tetapi sesudahnya mengalami kemunduran. Di sini pengertian *society* merujuk pada orang-orang yang tinggal dalam satuan wilayah administrasi tertentu. Meskipun demikian yang dimaksud oleh penulis jelas tidak berbeda dengan masyarakat warga yang satuan atau dasar pengelompokannya bebas dari unsur-unsur negara. Menganalisis hubungan *state-society* di Vietnam, Koh ingin menunjukkan bahwa *society* tidak sepenuhnya hilang dalam negara komunis. Pandangan bahwa partai negara dominan di negara komunis dan meninggalkan sedikit ruang bagi masyarakat, tidak sepenuhnya benar untuk Vietnam pasca perang. Lebih-lebih dengan *doi moi* akhir tahun 1980-an, tekanan kepada negara untuk mengurangi cengkeraman terhadap masyarakat terus dilakukan dan tersedia ruang yang semakin terbuka bagi masyarakat. Pada kasus *ward* ini, *society* semakin berkembang sejalan dengan merosotnya peranan negara dan partai komunis. Semula *ward* menjalankan peran mirip negara, menjalankan administrasi “*from cradle to grave*”, tetapi sejak awal tahun 1990-an satu demi satu tugasnya ditanggalkan. Sebab utamanya adalah merosotnya keuangan partai dan negara, sehingga kontrol ke tingkat bawah melemah.

Sejalan dengan analisis Koh, Thomas menunjukkan semakin berkembangnya *non state crowd* di Vietnam. Thomas (2001) mengguna-

kan pengertian *society* sangat longgar, termasuk di dalamnya kerumunan. Secara sosiologis *crowd* adalah kumpulan individu-individu di satu tempat yang mempunyai perhatian yang sama terhadap suatu kejadian atau peristiwa. Mereka bukan organisasi. Sebelum tahun 1990-an *crowd* muncul atas sponsor negara, seperti perayaan kelahiran Ho Chi Minh, kelahiran Lenin, Pham van Dong dan Nguyen van Linh maupun perayaan kelahiran Partai Komunis Vietnam. Akhir-akhir ini aktivitas seperti ini tidak menarik perhatian publik. Sebaliknya peristiwa-peristiwa yang tidak disponsori negara mengundang kerumunan yang sangat besar, seperti tamu artis, pemakaman jenazah seorang artis terkenal, perayaan kemenangan tim sepak bola dan sebagainya. Lokasi-lokasi strategis seperti perempatan Ba Dinh, Danau Hoan Kien, Pagoda Tortoise yang sebelumnya merupakan tempat “sakral”, telah menjadi “profan” oleh kerumunan rakyat jelata perkotaan.

Kajian teoritis Kerkvliet (2001) menggunakan pengertian *society* sebagai “*a summary term for people in a country, including their institutions and environment*”. Konsep ini sangat luas, mencakup semua organisasi, lembaga dan aktivitasnya. Salah satu di antaranya adalah negara. Dalam pengertian ini organisasi formal, informal, aktivitas lembaga, individu-individu mulai dari pemikiran, aktivitasnya dan produk lainnya, tercakup dalam konsep *society*. Tentu yang dimaksud oleh Kerkvliet tidak berbeda dengan

masyarakat warga. Tidak semua masyarakat memiliki kualitas masyarakat warga yang sama. Menurut Kerkvliet masyarakat warga merupakan individu-individu dan kelompok-kelompok yang bebas dari campur tangan negara. Mereka mampu menyatakan ide, menulis, berbicara, mengorganisasi di sekitar berbagai kepentingan dan melakukannya di tempat-tempat umum. Untuk dapat melakukannya, diperlukan toleransi dari negara dalam hal adanya perbedaan pendapat dan organisasi. Toleransi juga dibutuhkan dalam memelihara lembaga, hukum dan dalam menjalankan kegiatan. Dengan demikian, masyarakat warga merupakan bagian dari masyarakat. Masyarakat warga bisa hilang atau mandul, tetapi masyarakat akan tetap ada sejauh komunitas individu-individu tetap ada.

Para penulis juga tidak memberikan pengertian khusus tentang negara, kecuali Kerkvliet. Menurut Kerkvliet pengertian negara merujuk pada pejabat-pejabat dan lembaga-lembaga yang membuat, melaksanakan dan menyelenggarakan undang-undang yang mencakup seluruh masyarakat dan berbagai bagiannya. Dalam studi tentang negara, yang dimaksud bukan semata-mata organisasi yang paling tinggi yang memiliki wewenang menggunakan kekerasan fisik, tetapi juga mereka yang mengoperasikannya yang disebut pemerintah. Tetapi para penulis artikel yang dibahas ini memandang negara sebagai lembaga yang menjalankan fungsi koersif dan

ideologi, dan kurang menonjolkan fungsi administratif. Sebab itu negara menurut mereka lebih dari pemerintah. Karena negara tanpa kecuali mencoba untuk mengontrol dan membatasi aktivitas politik masyarakat dengan hukum. Dengan menghadapkan antara negara dengan masyarakat warga, negara jelas dipandang sebagai kekuatan otonom. Heng menggunakan istilah *menegosiasi* untuk menunjukkan masyarakat warga melakukan tawar-menawar dengan negara. Pandangan demikian sangat tepat untuk kasus Korea Selatan dan Vietnam, karena kedua negara ini sebelum melakukan reformasi adalah negara otoriter. Korea Selatan selama beberapa dekade berada di bawah rejim militer dan menerapkan pengawasan, kontrol dan pembatasan-pembatasan terhadap aktivitas warga negara. Sedangkan Vietnam adalah negara sosialis komunis yang mengawasi aktivitas warga negara dengan ketat. Pada kedua negara itu terdapat otonomi negara, di mana negara imum (kebal) terhadap tekanan dari warga.

Menariknya, bagi para penulis, Korea Selatan dan Vietnam mengurangi derajat hegemoniknya justru bukan tekanan dari masyarakat warga, tetapi hasil proyek neoliberal seperti destatisasi maupun deregulasi. Korea Selatan pemerintahnya menghadapi krisis keuangan dan pengusahanya diundang untuk memainkan peran lebih besar dalam bidang ekonomi. Tetapi para pengusaha menuntut adanya efisiensi, seperti praktek pemerintahan yang

bersih. Hal demikian mereka lakukan untuk menghasilkan output yang lebih efisien guna bersaing di pasar internasional. Sementara Vietnam sejak kejatuhan blok Sosialis kurang memiliki dukungan ekonomi dan politik di fora internasional, khususnya dari Uni Soviet. Vietnam juga mengundang investor untuk menanamkan modalnya dengan cara menghapus semua ketentuan lama yang menghalangi masuknya modal asing (*non tariff barriers*). Secara ekonomi kedua negara menjadi demikian liberal dan hal itu merupakan pintu masuk ke demokrasi. Masyarakat warga memanfaatkan momentum itu dan menekan negara untuk memberikan ruang publik dan wacana publik yang selama ini dikuasai negara. Dalam perspektif demikianlah para penulis menjelaskan kedudukan negara di Korea Selatan dan Vietnam.

Ilmu sosial memiliki berbagai perspektif, seperti yang terlihat pada konsep-konsep masyarakat warga dan negara, sehingga kita sering kesulitan untuk memahami suatu konsep. Dalam hal masyarakat warga, ada yang menekankan kepada ruang di mana individu dan kelompok dalam masyarakat dapat saling berinteraksi dengan semangat toleransi. Dalam ruang tersebut masyarakat dapat melakukan partisipasi dalam pembentukan kebijakan publik. Di sisi lain ada yang menekankan pada proses perjuangan suatu organisasi atau asosiasi dalam usaha membangkitkan masyarakat untuk mengelola dirinya sendiri dan mengurangi dominasi negara. Konsep-konsep yang

dikemukakan oleh Kim, Kessler, Heng dan Koh lebih dekat pada pengertian yang terakhir ini. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa masyarakat warga merupakan suatu ruang yang terletak antara negara di satu pihak dan masyarakat di pihak lain, di mana dalam ruang tersebut terdapat asosiasi warga masyarakat yang bersifat sukarela dan terbangun sebuah jaringan hubungan di antara asosiasi tersebut. Bentuk asosiasi tersebut bermacam-macam, seperti kelompok-kelompok bisnis, gerakan sosial, tetapi sifatnya independen terhadap negara. Hal demikian berarti sebuah masyarakat warga harus terlepas dari campur tangan negara baik secara sosial, ekonomi maupun politik (Hall, 1995).

Antara negara dan masyarakat warga tidak saling berhadapan, apalagi yang satu mematikan yang lain. Yang dibutuhkan adalah ruang publik yang memungkinkan warga negara mengembangkan diri secara optimal dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk bidang politik. Untuk yang terakhir ini, perlu dibuka akses yang sama bagi tiap-tiap warga negara atau kelompok terhadap organ-organ negara. Dengan pengertian masyarakat warga seperti itu dapat pula dibedakan antara masyarakat warga dengan masyarakat. Masyarakat warga merupakan asosiasi dalam suatu masyarakat yang mengandung aspek politis, sedang masyarakat merangkum keseluruhan perkumpulan baik yang terartikulasi secara politis maupun yang tidak, mereka dilindungi oleh negara.

Bahkan prinsip non intervensi sebagaimana dikemukakan oleh Gramsci (Simonn, 2000; Chandhoke, 2001) memerlukan legalitas dari negara itu sendiri. Sebuah negara yang demokratis membutuhkan masyarakat warga yang demokratis. Demikian pula sebaliknya, sebuah masyarakat sipil yang demokratis tidak dapat bertahan jika negara tidak demokratis. Karena tugas utama dari negara yang tidak demokratis adalah menghancurkan masyarakat sipil (Chandhoke, 2001).

C. Masalah Penelitian dan Penjelarasnya

Ketujuh penulis mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbeda, tetapi dalam bingkai yang sama yaitu hubungan negara dan masyarakat warga. Kesemuanya menempatkan permasalahan dalam konteks masyarakat transisi dari pemerintahan otoriter ke pemerintahan demokrasi (Korea Selatan) dan prospek demokrasi di negara Vietnam. Kim (2001) membahas hubungan antara negara dan masyarakat warga di Korea Selatan sejak tahun 1987 yang difokuskan pada peran gerakan sosial dalam proses demokrasi. Gerakan sosial yang dimaksudkan adalah semua usaha-usaha anggota masyarakat baik terorganisasi maupun tidak yang ditujukan untuk mengurangi dominasi negara, membangun ruang publik dan wacana publik. Proses demokrasi umumnya terdiri dari tiga tahap, yaitu liberalisasi, transisi dan konsolidasi. Di Korsel transisi demokrasi dari pemerintahan

otoriterian diawali dengan demokrasi Juni 1987 hingga lahirnya pemerintahan sipil 1993. Sedang konsolidasi berlangsung pada tahun-tahun sesudahnya. Empat karakteristik yang sangat penting berkaitan dengan formasi masyarakat warga adalah perubahan sosial dari transisi ke modernitas, transisi ke dunia internasional, sistem kepartaian dan budaya politik. Perubahan sosial dari tradisional ke modernitas di Korsel ditandai dengan peran berlebih negara dan masyarakat yang lemah. Ini berbeda dengan Eropa, di mana masyarakat warga memainkan peran penting dalam pertumbuhan demokrasi. Individualisme yang merupakan prinsip dasar kemasyarakatan juga turut membantu meletakkan dasar bagi demokrasi modern. Hal tersebut kontras dengan Korsel yang berbasis familisme sebagai akibat dari kuatnya etika Konfusianisme. Hubungan negara dan *civil society* dipahami sebagai "*family-centered state*" yang prosesnya *top down*. Proses ini berlawanan dengan logika demokrasi yang lebih *bottom up*.

Periode transisi menuju keterbukaan dengan dunia luar dimulai pada tahun 1876 hingga dimulainya kolonisasi Jepang tahun 1910. Periode ini merupakan percepatan perubahan dari masyarakat feodal ke sistem kapitalisme. Kemudian kolonisasi Jepang (1910-1945) mempercepat pertumbuhan organisasi pergerakan, seperti gerakan pembebasan nasional, gerakan buruh dan gerakan petani. Ketika Jepang meninggalkan Korsel;

1945, terjadi *vacum of power* dan diikuti dengan gerakan pembebasan. Selama tiga minggu Korsel tidak punya pemerintahan, gerakan-gerakan sosial tumbuh dengan cepat sampai Amerika Serikat mendudukinya. Konsolidasi gerakan akar rumput mempercepat kepergian Amerika Serikat sampai terjadinya Perang Korea (1950-1953). Rejim Rhee Syngman memerintah dengan otoriter dan menindas masyarakat warga. Kondisi ini terus berlangsung sampai tahun 1993.

Ketidakstabilan sistem kepartaian juga berpengaruh dan memberi ciri mesyarakat warga. Di bawah rejim militer, partai-partai tidak memiliki otonomi dan tidak demokratis. Masyarakat warga tidak mampu bangkit. Di bawah Park kekuasaan partai-partai atau dasar dari kepartaian lebih didasarkan pada wilayah tertentu sehingga lahir beberapa bentuk regionalisme. Situasi ini juga tidak memberi tempat berarti bagi masyarakat warga. Kondisi tersebut ditunjang oleh budaya politik Korea Selatan, seperti familiisme, otoriterisme dan *Minjung* yang kurang memberi tempat bagi demokrasi. Transisi ke demokrasi terbuka dengan pertumbuhan ekonomi dan integrasi dengan kapitalisme global. Kapitalisme seperti di Korsel dalam perjalanannya tidak sejalan dengan pemerintahan diktator. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi itu, tumbuh pula masyarakat warga yang berada di bawah payung *Chaeya* yang dalam perjalanannya memperoleh dukungan dari ormas intelektual, keagamaan, pelajar dan

buruh. Demonstrasi Juni 1987 merupakan titik kebangkitar masyarakat warga. Sebagai respons dari demonstrasi tersebut. Pemerintahan Chun mengumumkan Deklarasi 29 Juni yang berisi dukungan terhadap pemilihan presiden secara langsung. Menyikapi perubahan itu, kelompok oposisi terpecah dan hal itu menguntungkan pemerintah yang berkuasa, sehingga transisi dari Chun do Huan ke Roh Thae Woo berjalan mulus. Roh adalah presiden pertama hasil pilihan rakyat. Namun dalam Majelis Nasional ia tidak memperoleh mayoritas dan mengalami kegagalan dalam menyusun program.

Pada tahun 1993 Kim Young Sam dari Democratic Liberal Party (DLP) memenangkan pemilihan presiden. Ia segera melakukan konsolidasi demokrasi. Langkah terpenting adalah mengembalikan militer ke barak. Tahun 1997 terjadi krisis ekonomi dan legitimasi politik Kim melemah. Hal penting yang mengarah pada proses transisi dan konsolidasi demokrasi adalah meledaknya pertumbuhan gerakan-gerakan sosial. Meskipun gerakan sosial ini kemudian juga terpecah, tetapi mereka berjasa dalam membangun demokrasi dan mengakhiri otoriterisme di Korea Selatan. Kelemahan dari gerakan sosial tersebut antara lain, ketidakmandirian finansial, menjalankan strategi "departement store" (tidak memfokuskan pada satu isu, sehingga tidak menguasai isu-isu tersebut dengan baik).

Kessler (1998) membahas konteks global hubungan negara dan masyarakat warga dan prospek bagi masyarakat Asia Tenggara. Menurut Kessler, masyarakat warga merupakan konsep yang berasal dari Barat. Demikian pula globalisasi merupakan usaha perluasan pemikiran dan nilai-nilai Barat. Bila masyarakat warga merupakan basis demokrasi, apakah ditemukan sumber-sumber masyarakat warga di Asia Tenggara? Kessler menyebutkan bahwa dari sumber-sumber pemerintahan, nilai-nilai masyarakat Asia Tenggara seperti *Indic State*, dasar-dasar Islami, neokonfusianisme dan warisan politik kolonial, tidak ditemukan dasar yang kuat untuk tumbuh dan berkembangnya masyarakat warga.

Indic State merupakan konsep yang bersumber dari ajaran Hindu Budha yang memandang negara sebagai suatu mikrokosmos surgawi. Penguasa mulai dari kepribadian sampai istananya merupakan personifikasi mikrokosmos. Tatanan politik yang dibangun menciptakan dan mengabsahkan kembali kosmos ketuhanan. Penguasa menjadi pusat tatanan sosial manusia sekaligus penghubung antara dunia manusia dan kosmos ketuhanan. Dalam konteks demikian, masyarakat lemah, negara kuat. Penduduk *immobile* dan terasing dari istana.

Nilai-nilai islam seperti yang terlihat pada kesultanan, tidak memiliki gagasan mengenai ranah publik, suatu arena yang sah mengenai masyarakat warga atau warga negara yang aktif.

Kelangsungan kesultanan terletak pada keberhasilan penguasa mengesampingkan akses massa ke negara sekaligus melibatkan mereka dalam aktivitas yang terdepolitisasi. Peradaban islam juga memiliki ulama yang mengklaim sebagai pembawa suara moralitas dan keadilan, pada kenyataannya mereka cenderung mengakomodisasi kekuasaan penguasa, sehingga dalam masyarakat islam masyarakat warga lemah dan negara kuat.

Dalam neokonfusianisme dikenal teori "mandat surgawi" dan budaya politik yang didasarkan olehnya. "Selama rejim tersebut berkuasa, patuhilah/meskipun dalam hati memendam perlawanan atau ketidakpuasan". Hal ini mendorong warga negara pasif dan menghalangi warga negara aktif serta setiap gagasan ranah publik atau *civil society*. Konfusianisme berbasis pada familiisme yang kurang memberi tempat bagi individualisme, sehingga kritik-kritik sosial atau wacana di luar aliran utama tidak dapat berkembang.

Berbeda dengan Eropa yang muncul dari kebangkitan masyarakat warga dan kaum borjuis, negara-negara Asia Tenggara muncul dari warisan politik kolonial. Negara kolonial tidak muncul dari pertumbuhan masyarakat warga setempat. Meski demikian keduanya lahir dari proses yang sama yaitu revolusi ekonomi dan sosial borjuis Eropa Barat. Bedanya, negara kolonial dirancang untuk memenuhi kebutuhan kelas menengah komersial metropolitan. Kolonialisme

meninggalkan warisan tradisi politik dan struktur negara yang kuat, terpisah dari tiap usaha warga negara yang aktif dan karena tujuan pembentukan negara kolonial bersifat ekonomis, maka beban yang ditinggalkan adalah kemiskinan. Jadi negara pascakolonial menunjukkan sifat ganda, dalam hubungannya dengan masyarakatnya sendiri ia kuat tapi dalam forum internasional ia lemah.

Heng (2001) membahas bagaimana media menegosiasi negara di Vietnam. Dalam sistem pers Leninis di Vietnam, batas-batas yang memisahkan negara-media tidak didefinisikan secara jelas. Dengan *doi moi*, pers berusaha menegosiasi negara untuk memperoleh ruang publik yang lebih memadai. Menurut Heng, dalam berhadapan dengan rejim sosialis, media dihadapkan pada dilema. Di satu sisi harus menunjukkan dukungan pada kebijakan *doi moi* yang terbuka, di sisi lain harus dapat menjaga hubungannya dengan Partai Komunis Vietnam (PKV) yang mempunyai peran menentukan.

Heng mendasarkan analisisnya pada 3 kasus yang diambil dari publikasi di media Vietnam. Selain itu ia juga melakukan wawancara dengan para jurnalis Vietnam. Sebagai bagian dari *doi moi*, dilakukan pembaharuan UU Pers. Pasal-pasal khususnya pasal 9 dan 28 menjamin adanya kebebasan pers. Bagi negara, ini merupakan suatu langkah untuk memberi kesan bahwa negara sosialis Vietnam adalah negara hukum. Akan tetapi terjadi tarik-

menarik yang panjang antara jurnalis dengan negara tentang UU Pers 1999, interpretasinya, isi dan cakupannya. Pada kasus pertama, hakim menyita *tape recorder* wartawan karena digunakan untuk merekam percakapan hakim. Bagi hakim, itu suatu pelanggaran. Bagi wartawan – tindakannya dijamin oleh UU. Wartawan dari berbagai media membela koleganya dan memunculkan kampanye besar-besaran dari media untuk mendapatkan perlakuan yang lebih baik dari para penegak hukum. Kasus kedua juga berhubungan dengan penggunaan *tape recorder*. Pengadilan menyatakan bahwa penggunaan alat itu di ruang sidang harus dengan seijin ketua pengadilan. Para jurnalis berusaha mendapat ijin, tetapi pejabat berwenang lebih banyak berputar-putar pada aturan yang tidak jelas. Akhirnya pengadilan memutuskan bahwa alat-alat seperti tape dan kamera hanya boleh digunakan untuk pembela dan bukan untuk hakim. Bagi para wartawan hal tersebut dipahami sebagai mekanisme untuk menyeleksi peliput berita. Hanya mereka yang diundang yang boleh meliput sidang, lainnya berdiri di luar mengikutinya lewat pengeras suara. Ini menimbulkan keributan di kalangan jurnalis. Kasus ketiga melibatkan wartawan dengan polisi. Para polisi mengusir penduduk secara paksa dari sebuah gedung. Wartawan dilarang meliput. Polisi memukul wartawan, membanting kamera dan menyita kamera. Para jurnalis melobi kantor Menteri Kebudayaan dan Informasi

serta Asosiasi Jurnalis untuk melancarkan serangan atas nama jurnalis dan memprotes polisi. Tetapi belajar dari dua pengalaman sebelumnya, mereka ragu untuk melakukan konfrontasi di pengadilan.

Ketiga kasus tersebut menunjukkan kecacatan dasar dalam sistem hukum Vietnam. Pengadilan sebagai pihak yang paling kredibel menafsirkan UU, kurang yakin akan isi dan status hukum sehingga selalu ragu-ragu. Tetapi diperoleh pelajaran berharga, bahwa para jurnalis mempunyai kekuatan legal untuk terus mengintimidasi para pejabat partai dan pejabat negara. Ketiga kasus tersebut juga menunjukkan dinamika negara - media yang kompleks. Pada satu sisi adalah realitas kekuasaan di bawah PKV dengan kontrol politik yang sangat ketat. Di sisi lain sebuah masyarakat media yang aktif yang tengah membangun identitasnya. Dalam proses inilah kedua entitas tersebut dianalisis dalam hubungan negosiasi.

Batas antara negara dan media kadang jelas kadang kabur. Misalnya seminggu sekali para editor menghadap Departemen Ideologi VCP untuk mendapat *briefing*. Di sini jelas negara memerintah media. Tetapi dari tiga kasus tersebut para organ partai enggan memerintah media. Di sini keduanya terkunci dalam sebuah proses negosiasi, dua pihak yang bersaing yang masing-masing mengerahkan sumberdayanya untuk mempengaruhi masyarakat. Ketika media berhubungan dengan kalangan

penjaga (pejabat negara dan pejabat partai), negosiasi negara - media didominasi oleh hubungan pemerintah langsung yang harus ditaati oleh media. Di luar itu hubungan media-negara tidak mempresentasikan negara otoriterian. Sebuah pemahaman yang komprehensif terhadap negosiasi media-negara harus dilakukan di luar kotak yang dibangun rejim Departemen Ideologi VCP. Jadi bagi negara retorika pembaharuan hukum sangat dibutuhkan meskipun pada saat yang sama mengacaukannya. Fraksi internal dan organ-organ negara masih mempersempit ruang gerak media. Karena itu para jurnalis tidak begitu yakin akan janji hukum kebebasan pers, semangat yang ada bukanlah komitmen pers yang bebas, tetapi keharmonisan. Berbagai keterkaitan antara hukum dengan kebebasan pers harus diinterpretasikan secara terbatas. Gagasan tentang negosiasi media- negara atas nama hukum kebanyakan merupakan antisipasi dibanding sebenarnya.

Penelitian Mandy Thomas tentang kerumunan (*crowd*) bermaksud menunjukkan konsekuensi sosial politik dari perubahan atas penyesuaian Vietnam (*doi moi*) terhadap media global. Penelitian difokuskan pada ruang publik (adanya peluang dimana masyarakat dapat menyatakan ide atau sikapnya). Sebelum tahun 1990-an, seperti dikemukakan oleh Scott, hampir tidak ditemukan kerumunan/ keramaian (*crowd*) di Vietnam. Kalaupun ada berupa perayaan perayaan yang diorganisasi oleh partai

negara dan untuk kepentingan sendiri. Tetapi sejak *doi moi* makin sering ditemukan kerumunan/keramaian khususnya di lokasi strategis di kota seperti perempatan Ba Diah, Danau Hoan Kiem, Pagoda Tortoise dan sebagainya. Tempat-tempat tersebut yang sebelumnya sepi, telah menjadi tempat yang paling potensial untuk menyatakan ketidakpuasan.

Akhir-akhir ini terjadi hal-hal kontras, perayaan kelahiran Ho Chi Minh yang didukung dan diorganisasi partai komunis juga perayaan kelahiran Lenin, Pham van Dong dan Nguyen van Linh; disikapi publik secara apatis. Sebaliknya peristiwa seperti La Vang Festival (yang diselenggarakan oleh umat katolik), kemenangan tim sepakbola Vietnam atas Indonesia di Piala Tiger, Pra Piala Dunia 1998 dan panggung musik, memperoleh sambutan masyarakat yang luar biasa. Negara melalui partai membatasi jumlah pengunjung terhadap even-even seperti itu. Gejala terakhir ini menunjukkan membesarnya *non state crowd*. Hal tersebut tidak terlepas dari peran media. Sejak *doi moi* 1989, media tidak lagi menjadi alat partai (propaganda) dan lebih memfokuskan laporan-laporan yang mendidik masyarakat. Akhir-akhir ini berita-berita mengenai kejahatan, korupsi dan pergolakan sosial telah banyak dimuat meskipun sukses partai dan berita tentang sukses masyarakat sosialis Vietnam masih dominan. Peningkatan jumlah majalah dan koran juga cukup besar. Liputan tentang kesalahan polisi, pejabat partai di tingkat lokal termasuk

korupsinya mulai berani diungkap. Meskipun demikian masih diperlukan kebebasan pers yang lebih besar. Jurnalis Vietnam dihadapkan pada dua persoalan, yaitu tuntunan pembaca dan Menteri Informasi dan Kebudayaan yang mengeluarkan ijin.

Kerumunan atau keramaian di luar kehendak negara secara kasat mata juga dapat dilihat dari bangkitnya dunia hiburan di Vietnam. Acara marathon Hanoi-Saigon dibanjiri peserta. Kegandrungan orang-orang muda pada tabloid-tabloid selebritis dan acara-acara yang diadakannya selalu menarik pengunjung. Meskipun hal tersebut ditentang generasi tua dengan menyebut racun kapitalis barat, tetapi anak-anak muda mulai berani menyatakan penolakan terhadap generasi tua. Beberapa informan menyatakan bahwa orang-orang seperti Ho Chi Minh, Vo Nguyen Giap tersebut bukan pahlawan, tetapi warga biasa. Tak berbeda dengan pemain sepakbola. Pernyataan-pernyataan generasi muda mulai menunjukkan adanya individualitas, minimal mereka mengkonsumsi budaya pop. Gejala tersebut juga ditemukan pada poster, kaset, opera, CD, video dan bahkan T-Shirt. Kegandrungan pada selebritis telah menurunkan rasa hormat pada simbol-simbol negara sosialis.

Civil Society / CS (masyarakat warga) di Vietnam adalah istilah untuk menggambarkan aktivitas masyarakat. Termasuk aktivitas politik yang tidak dikontrol partai negara. Pada masyarakat Vietnam, pengertian CS

dikacaukan dengan budaya pop. CS sebenarnya untuk menunjukkan kebangkitan masyarakat yang tidak disponsori negara sedang budaya pop lebih terkait pada budaya material. Jadi budaya pop bagian dari budaya pada umumnya. Kebangkitan budaya pop ini diyakini oleh sebagai kebangkitan demokrasi, karena hubungan erat dari tiga konsep *celebrity*, media dan demokrasi (Hartley, 1996). Juga Marshall (1997) yang menelaah hubungan antara demokrasi, *celebrity* dan jumlah pembaca. Hartley merujuk pada revolusi Prancis dan Amerika Serikat di mana media memegang peran penting. Generasi muda Vietnam memang mulai anti partai komunis. Ada semacam kesadaran mereka dengan mengkonsumsi media, idola mereka telah beralih seperti pada penyanyi rock Le Cong Tuan An.

Sejak *doi moi*, perubahan mendasar juga terjadi pada ekonomi. Dengan terpaan media, muncul selera pasar dan individualisme. Ruang publik di kota-kota bukan lagi ajang pentas partai, tapi telah berubah menjadi arena perdagangan, festival keagamaan dan pertunjukkan musik. Negara lebih toleran. Masyarakat juga semakin sering menyampaikan protes tanpa pimpinan yang jelas. Buruh, wanita, pemuda telah mengambil tempat penting dalam protes.

Kerkvliet (2001) membahas hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah di Vietnam dan bagaimana pendekatan tentang hubungan tersebut. Dalam analisisnya

ia mengusulkan sebuah pendekatan untuk menganalisis hubungan negara-masyarakat di Vietnam dengan mencoba membedakan antara apa yang ada dalam negara dan apa yang ada dalam masyarakat. Lebih jauh lagi, pendidikan yang diselenggarakan menekankan bahwa bidang-bidang di mana hubungan antara negara dan masyarakat bisa menjadi sebuah permasalahan. Bidang-bidang ini dapat berupa tempat-tempat tertentu, organisasi-organisasi, kelompok-kelompok dan kebijakan-kebijakan. Penelitian untuk menunjukkan akurasi pendekatan tersebut difokuskan pada 4 (empat) isu utama : institusi dan proses-proses pemerintahan, media massa, kolektivitas pertanian dan korupsi.

Pendekatan I disebutnya "*dominating state*" yang menyatakan bahwa aturan-aturan dan program – program pemerintah Vietnam dibuat oleh negara, di mana PKV memegang peran utama. Pendekatan ini oleh para peneliti lain dinyatakan dalam pernyataan yang berbeda, misalnya Womack (1992: 180) merumuskan otonomi di bawah partai negara (PKV) yang menguasai penyusunan dan implementasi kebijakan dari pusat sampai pelosok negeri. Thayer (1991:111-112) menyebutkan "*monososialisme organisasional*" yang menyisakan ruang sangat sedikit bagi aktivitas

independen. Kerkvliet juga menyebut pendekatan sistem ini dengan model politik birokratik. Pendekatan kedua merupakan

modifikasi dari yang pertama yang disebutnya otoriterisme mobilisasional sering disebut pula korporatisme negara. Pendekatan ketiga disodorkan oleh Kerkvliet berada di antara kedua pendekatan terdahulu yang disebut korporatisme mobilisasional. Ini memberi perhatian terhadap pentingnya berbagai organisasi, secara khusus ada satu organisasi untuk tiap sektor utama di mana negara masih mapan. Negara menggunakan organisasi-organisasi ini untuk mobilisasi dukungan dari masyarakat terhadap kebijaksanaannya, memelihara saluran komunikasi antara otoritas dengan tiap-tiap sektor masyarakat dan mengelola kelompok-kelompok sosial ekonomi. Peneliti juga menyimpulkan, bahwa munculnya berbagai organisasi dalam masyarakat juga mengindikasikan adanya tuntunan dialog dengan negara.

Dalam hal pembuatan kebijakan, institusi – institusi utama di Vietnam adalah pemerintah dan partai komunis. Pemerintah Pusat mencakup kabinet dan Dewan Nasional, sedangkan Pemerintah Lokal dari propinsi, distrik, kota, subdistrik (xa). Selain itu terdapat Komite Sentral Partai dan Polit Biro. Proses pembuatan kebijakan sangat sulit diikuti. Akses kepada pembuat kebijakan juga sangat minim. Tetapi hampir dapat dipastikan, PKV memegang peran kunci. Hal ini karena dari pusat ke daerah jabatan-jabatan di pemerintahan ditempati anggota partai. Hanya bagian mana dari partai ini yang paling berperan, bagaimana liku-likunya, sulit diikuti. Ada 24 ormas besar yang tergabung dalam

Fatherland Front. Ormas-ormas ini berfungsi sebagai sarana mobilisasi massa dan dukungan terhadap pemerintah. Banyak warga Vietnam ikut ormas, partai dan negara, sebagai perwujudan semangat heroisme sisa-sisa perang. Meskipun demikian sudah timbul usaha memperjuangkan kepentingan anggota, seperti KADIN, Konfederasi Ketenagakerjaan, Asosiasi Petani dan sebagainya. Hal tersebut membuktikan pendekatan negara dominan dan korporatisme mobilisasional kadang-kadang kurang relevan. Banyak kasus dimana koneksi pribadi lebih efektif dalam mempengaruhi keputusan. Selain itu terdapat beberapa bukti efektifitas tindakan tak terorganisasi, seperti pada kasus perumahan di kota-kota. Tekanan masyarakat tak terorganisasi telah membantu membentuk peraturan-peraturan negara. Ini sesuai dengan pendekatan dialogis. Kebijakan-kebijakan juga lahir dari tekanan organisasi atau gerakan yang terorganisir. Misalnya pemogokan buruh, petani, demonstrasi penduduk Propinsi Nam Dinh, Propinsi Tan Hoa dan Dong Nai. Gejala-gejala tersebut telah melahirkan wacana bagaimana negara harus berhenti untuk merencanakan dan mengendalikan ekonomi. Hasilnya adalah ruang yang sedikit terbuka bagi individu, rumah tangga dan masyarakat.

Bidang lain yang digunakan untuk menunjukkan hubungan negara dan masyarakat adalah media. Pada kasus ini pendekatan *negara dominan dan korporatisme mobilisasional*

bekerja dengan baik. Semua sistem media : TV, radio, telepon, film dan internet dimiliki dan dikuasai negara. Demikian pula surat kabar, penerbitan dan percetakan. Mereka yang mencoba melakukan penyimpangan, menghadapi kesulitan. Meskipun demikian, adanya internet telah membantu membangun wacana di luar kehendak negara. Di kalangan pers dan dalam negara sendiri telah muncul perdebatan tentang peranan media. Generasi tua dan kader-kader muda partai masih berada pada arus utama, bahwa memberikan kebebasan media berakibat keruntuhan negara seperti Soviet. Hantu kapitalisme akan menghisap darah rakyat dengan bersembunyi di balik HAM dan demokrasi. Meskipun para jurnalis terus berjuang menghadapi penyensoran, pengaruh ekonomi pasar telah membawa isi media yang beraneka ragam, termasuk berita-berita korupsi dan munculnya tabloid selebritis.

Pertanian kolektif melibatkan usaha kepemilikan pertanian untuk mengumpulkan atau menyatukan tanah, ternak dantenaga kerja yang kemudian bekerja bersama untuk mengelolanya. Penduduk desa diorganisasi dalam kelompok-kelompok kecil yang diarahkan oleh sebuahkomite. Kelompok-kelompok itu disebut kolektif. Anggota kolektif diberi upah berupa hasil produksi. Kolektif ini mempunyai peran penting selama perang. Tetapi usai perang terjadi perdebatan tentang besar kecilnya kolektif dan basis yang digunakan. Selain itu pelaksanaan di

lapangan menghadapi banyak masalah, seperti banyak anggota yang keluar, hasil yang terlalu kecil, tidak menghargai kerja keras individu, pura-pura sakit dan banyak anggota bekerja setengah hati. Alasan utama dari persoalan tersebut adalah pendapat penduduk desa bahwa kolektif menghalangi usaha perbaikan pangan. Akhirnya usaha ini dihentikan pada tahun 1979 dan beralih ke usaha rumah tangga individual. Perubahan ke arah ini semakin cepat pada tahun 1990-an. Lahirnya kebijakan tersebut dan menguatnya dukungan rakyat pada tahun 1960-an menunjukkan bukti-bukti bekerjanya pendekatan negara dominan dan korporatisme mobilisasional. Tetapi ada yang lebih berkoresponden dengan perdebatan dialogis yaitu implementasi kebijakan dan lahirnya kebijakan baru (ke rumah tangga). Bila tiga isu tersebut menekankan seharusnya warga negara memiliki otonomi yang lebih besar di luar otoritas negara dan jarak antara negara dan masyarakat seharusnya lebih jelas; tapi dalam kasus korupsi-sebaliknya. Otonomi yang lebih kecil dari negara untuk organisasi-organisasi, kelompok-kelompok, individu-individu, ruang lebih kecil bagi aktivitas-aktivitas non negara. Korupsi di Vietnam terkenal akut, memiliki banyak bentuk dan metode. Banyak peraturan-peraturan anti korupsi tidak diterapkan dan diawasi dengan baik. Warga menuntut penegakan hukum yang tegas. Sejalan dengan pendekatan negara dominan, pejabat negara dan pejabat partai menyikapi masalah korupsi. Banyak

pejabat negara dan pejabat partai yang dipecat, termasuk untuk PM Ngo Xuan Loc. Didapati juga bukti yang mendukung korporatisme mobilisasional. Asosiasi-asosiasi yang selama ini menjadi perpanjangan tangan negara, berkampanye melawan korupsi. Individu-individu, kelompok-kelompok dan kekuatan-kekuatan sosial di luar saluran resmi juga menekan pemerintah untuk menindak koruptor. Inilah bukti pendekatan *dialogis*. Dalam masing-masing bidang, riset tersebut juga menemukan pertimbangan-pertimbangan yang berlanjut mengenai isu hubungan negara dan masyarakat. Kecenderungan selama 20 tahun terakhir yang sebagian adalah basis dari kekuatan-kekuatan dan aktivitas sosial, telah mengubah ruang lingkup negara.

Riset Koh (2001) membahas bagaimana pelaksanaan kebijakan oleh partai negara (sebagai representasi negara) di tingkat lokal (*ward*)? Bagaimana pandangan kontemporer atas dominasi partai negara terhadap masyarakat pasca *doi moi*? Menurut Koh selama Perang Vietnam sampai tahun 1980-an, negara dan PKV begitu dominan memobilisasi rakyat dan risorsis lainnya. Setelah periode itu terjadi perubahan. Studi mengenai hubungan negara dan masyarakat terbagi atas negara kuat dan negara lemah. Sebagaimana Partai komunis lain, PKV meninggalkan ruang yang sangat sedikit bagi masyarakat. Partai negara merasuki setiap level masyarakat dan

mengontrolnya secara langsung. Dalam pandangan ini, partai bukar hanya dominan secara struktural, tetapi juga dalam pembuatan dan implementasi kebijakan. Ini menunjukkan bahwa sistem politik Vietnam sebenarnya sosialis birokratik. Karena birokrasi mendominasi partai dan partai mendominasi masyarakat. Partai sebagai mesin negara bekerja secara otoriter dan tidak responsif terhadap masyarakat. Ini menempatkan Vietnam sebagai negara kuat.

Tetapi krisis sosial ekonomi di Vietnam seiring dengan keruntuhan Blok Sosialis, menyebabkan menurunnya sumber daya. Akibatnya PKV dan negara tidak lagi dominan pada tingkat lokal, khususnya menjadi fokus kajian Koh. Ini menunjukkan negara lemah. Sebab-sebab khusus: peran negara yang lemah di tingkat *ward* adalah, pertama, rendahnya gaji. Para pengurus partai melakukan berbagai kecurangan untuk menutup kebutuhannya, misalnya renovasi kantor, rumah dinas dan sebagainya. Kedua, kurangnya kontrol dan supervisi. Berkurangnya dana atau anggaran negara, mengakibatkan lemahnya kontrol ke tingkat paling bawah. Lemahnya kontrol ini juga mendorong meningkatnya penyalahgunaan kekuasaan para birokrat guna mendapatkan manfaat ekonomi. Ketiga, moral dan kultural. Tindakan pejabat *ward* tidak hanya dipengaruhi oleh hukum formal, tetapi juga moral dan kultural. Faktor terakhir ini membuat aturan-aturan hanya di

atas kertas dan tidak berjalan efektif. Hubungan dengan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari mempunyai pengaruh signifikan, di mana masalah-masalah lebih diselesaikan secara informal. Para pejabat juga dihadapkan pada keadaan sulit dan mudah berbelas kasihan (*thong cam*), dan tidak menerapkan aturan secara selektif.

Penelitian Young (2001) membahas mengapa reformasi politik dalam jangka pendek gagal membawa transisi ke demokrasi? Penyebabnya adalah reformasi tidak berlangsung secara mendasar, seperti tidak memberikan hak sepenuhnya kepada rakyat untuk menyatakan aspirasinya. Dalam jangka pendek, yaitu periode demonstrasi Juni 1987 hingga pemerintahan Roh T Woo, militer masih sangat kuat dalam politik di Korsel. Mereka masih mampu melakukan tekanan untuk menjamin kepentingannya tidak tersingkirkan. Setelah tahun 1993, Kim Young Sam terpilih secara langsung dan memiliki legitimasi kuat, maka ia berani melakukan perubahan kebijakan yang mendasar, yaitu mengembalikan militer ke barak, mengadili para pelanggar hukum, membangun pemerintahan yang bersih dan efisien. Meskipun usaha tersebut sampai sekarang belum sepenuhnya berhasil, tetapi telah terbangun kesadaran masyarakat warga sebagai dasar demokrasi.

Pada kasus Korea Selatan ini menurut Young, kurangnya peneliti memperhatikan reformasi

administratif. Dua Kim (Kim Young Sam dan Kim Dae-jung), mengubah sosok administratif di Korsel dengan mereorganisasi birokrasi pemerintahan, menciutkan departemen, tetapi menempatkan orang-orang yang tanggap terhadap tuntutan masyarakat lokal dan masyarakat internasional. Birokrasi lebih tanggap dalam melakukan pelayanan publik. Ini memberi angin segar dunia bisnis, sehingga pemulihan ekonomi dari krisis telah menemukan jalan yang tepat. Reformasi pemerintahan, hukum dan birokrasi yang dilakukan oleh dua Kim tidak terlepas dari peran masyarakat warga yang telah berhasil membangun wacana demokrasi. Masyarakat merasa telah dikondisikan, sehingga perubahan yang dilakukan dapat berhasil. Semua ini memberi dasar yang baik bagi demokrasi di Korea Selatan.

D. Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa para penulis membahas kebangkitan masyarakat warga dan peranannya dalam membangun demokrasi. Umumnya masyarakat warga ditempatkan sebagai variabel pengaruh dan demokratisasi atau menurunnya peran negara sebagai variabel terpengaruh. Variabel-variabel bebas yang dibahas adalah: media massa, NGO, gerakan mahasiswa, gerakan buruh, organisasi lokal, pertanian kolektif, hiburan, ruang publik dan kerumunan. Terdapat gagasan yang sama dari para penulis, bahwa demokratisasi, *doi moi*,

reformasi, sangat sulit diwujudkan tanpa pembangunan ekonomi yang mengarah pada ekonomi pasar. Di negara berkembang, masyarakat warga merupakan produk dari pembangunan itu sendiri. Sebab itu disayangkan artikel-artikel yang dibahas tidak memberi tempat secara memadai proses lahirnya masyarakat warga.

Para penulis berangkat dari perspektif teori liberal untuk mengkritisi teori hegemoni, teori negara dominan maupun rejim otoriter. Korea Selatan sebelum reformasi merupakan negara dominan di mana masyarakat menguasai sumber daya ekonomi dan politik, memobilisasikannya untuk kepentingan rejim. Dalam beberapa hal negara menjalin hubungan dengan penguasa yang sebagian besar berasal dari luar negeri (Amerika Serikat, Jepang dan Eropa) serta sedikit penguasa dalam negeri. Setelah beberapa dekade, pengusaha dalam negeri tumbuh kuat dan menuntut efisiensi usaha dengan cara destatisasi dan deregulasi. Tuntutan ini membuka celah reformasi, di mana keterbukaan ekonomi harus disertai dengan keterbukaan politik. Ekonomi yang diserahkan pada mekanisme pasar, tidak akan mampu menghasilkan efisiensi yang optimal bila tidak ditopang dengan kompetisi yang terbuka dalam bidang politik atau demokratisasi. Pola berpikir yang sama diterapkan untuk kasus Vietnam. Bedanya negara yang terakhir ini merupakan negara sosialis. Tetapi ambruknya Blok Timur, justru

membuat negara Vietnam ini melangkah radikal dengan membuka iklim investasi yang Hak Guna Usahanya selama 75 tahun. Dalam hal upah buruh, Vietnam juga tidak menerapkan upah murah yang diproteksi negara, tetapi menyerahkannya pada mekanisme pasar. Demikian pula dalam membangun industrinya, negara ini tidak memberikan proteksi kepada jenis industri tertentu, meskipun industri yang digelutinya masih berada di sektor hulu.

Dengan demikian, para penulis berusaha menjelaskan demokratisasi di negara-negara tersebut dari teori liberal. Menurut teori ini, masyarakat sipil dengan sebuah sistem yang intinya hak-hak asasi manusia, tidak dapat bertahan kecuali negara membagi gagasan, memberi ruang gerak bagi individu dan kelompok di ruang ini. Teori Cohen dan Arato yang banyak dikutip juga berasumsi negara yang menciptakan hukum, memberi kekuatan pada hukum, menjaga ketertiban, mengejar kebijakan sosial dan menjamin keefektifan institusi sosial. Gerakan sosial sebagai bagian dari masyarakat warga menawarkan, menekan negara untuk memperoleh ruang publik. Usaha-usahanya juga termasuk mediasi, kompetisi antara negara dan institusi sosial lainnya. Dalam usaha seperti itu, termasuk di dalamnya membangun wacana publik.

Kerkvliet menggunakan pengertian yang berbeda untuk menunjukkan teori negara dominan tersebut, yaitu korporatis mobilisasional. Di sini ia menggaris

bawahi peranan dari organisasi-organisasi resmi baik dalam memobilisasi dukungan bagi negara serta menjadi sebuah saluran di mana kepentingan warga dapat mempengaruhi apa yang dilakukan oleh agensi negara. Tetapi individu-individu, kelompok-kelompok dan kekuatan-kekuatan sosial di luar saluran resmi juga dapat mempengaruhi sistem politik. Kerkvliet menyebutnya dialogis. Agensi-agensi negara tidak sepenuhnya memiliki kendali atas pembuatan kebijakan dan implementasinya. Warga negara dapat mengabaikan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh negara. Mereka

juga dapat bergerak melebihi saluran resmi agar pandangan-pandangannya dapat diketahui khalayak umum. Kelompok-kelompok yang bergerak di luar saluran resmi juga bukan hanya menunjukkan dirinya hadir, tetapi juga berusaha mempengaruhi kebijakan negara.

Menyimak analisis para penulis, saya berpendapat bahwa dalam masyarakat warga selain organisasi yang mandiri juga dipersyaratkan adanya ruang publik. Dalam ruang yang bebas ini warga dapat melakukan aktivitas sosial politik secara leluasa, tanpa dominasi sekelompok kecil orang. Hal ini akan memberi dorongan yang positif ke arah demokratisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Chandhoke, Neera. 2001. *Benturan Negara dan Masyarakat Sipil*. Yogyakarta: Istawa dan Wacana.
- Hall, John A.(ed). 1995. *Civil Society: Theory, History, Comparasion*. Cambridge: Massachussets Polity Press.
- Heng, Russel Hiang-Khng. 2001. "Media Negotiating the State: In the Name of the Law in Anticipation", *SOJOURN* Vol. 16 No. 2.
- Kerkvliet, Benedic J. Tria. 2001. "An Approach for Analysing State-Society Relation in Vietnam", *SOJOURN* Vol. 16 No. 2
- Kessler, Clive S. 1998. "State and Civil Society in South Korea 1987-1999: Civil Movement and Democratic Consolidation". *Asian Perspective* Vol. 25 No. 1
- Koh, David. 2001. "State-Society Relation in Vietnam: Strong State or Weak State?" *Southeast Asian Affairs*
- Mandy, Thomas. 2001. "Public Spaces/Public Disgraces: Crowd and the State in Contemporary Vietnam", *SOJOURN* Vol. 16 No. 2
- Simonn, Roger. 2000. *Pemikiran Politik Gramsci*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Young, Shin Kwang. 2001. "Democratization, Political Reform and Role of the State: State, Civil Society and Political Reform", *Korea Focus* Vol. 9 No. 6 November-December.